

**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DARI
SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**

**(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Lembata Propinsi NTT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:

**Maria Magdalena S. Elan
(992114141)**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DARI
SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**

**(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Lembata Propinsi NTT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:
Maria Magdalena S. Elan
(992114141)**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2006

SKRIPSI
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DARI
SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA PROPINSI NTT

Oleh:

NAMA : MARIA MAGDALENA S. ELAN
NIM : 992114141

Telah disetujui oleh

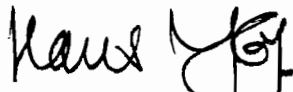
Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, SE., M.Si

Tanggal: 17 Oktober 2005

Pembimbing II



Ir. Drs. Hansiadi Y.H. M.Si., Akt

Tanggal: 13 Januari 2006

SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN

ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DARI

SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN

PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA PROPINSI NTT

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

NAMA : MARIA MAGDALENA S. ELAN

NIM : 992114141

Telah dipertahankan di depan Panitia penguji

Pada tanggal 28 Pebruari 2006

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

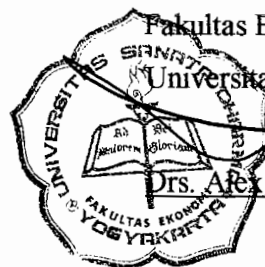
Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua : Dra. YF. M. Gien A., M.M., Akt.	
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota : Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.	
Anggota : Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si., Akt.	
Anggota : Romo Dr. James J. Spillane, S.J.	

Yogyakarta, 14 Maret 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Drs. Alex Kahu Lantum, MS.



HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:



- ❖ *Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai (Mzr: 126:5)*
- ❖ *Serahkanlah segala kuatirmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu (I Petrus: 5:7)*

Persembahan:

Dengan segala rasa kasih dan cinta skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ **Yesus Kristus dan Bunda Maria**
- ❖ **Bapak dan Mama tercinta**
- ❖ **Adik-adik tersayang**
- ❖ **Oche Wahon tersayang**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dalam daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 14 Pebruari 2006

Penulis,

Maria Magdalena S. Elan

ABSTRAK
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DARI
SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

**(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Lembata Propinsi NTT)**

MARIA MAGDALENA S. ELAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran belanja pembangunan daerah sektor perhubungan dan pariwisata tahun 2003, (2) untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata tahun 2003.

Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Lembata pada bulan Juni 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Efisiensi penggunaan anggaran belanja sektor perhubungan dan pariwisata dapat diketahui dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) memaparkan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan oleh sektor perhubungan dan pariwisata, (2) menentukan efisien atau tidak efisien penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata, (3) dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata untuk sektor perhubungan dan pariwisata dapat diketahui dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) melihat kembali rencana dan realisasi penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata, (2) membandingkan selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam laporan keuangan, (3) jika anggaran sama dengan sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya tidak ada dan dikatakan efisien.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pada umumnya anggaran yang digunakan oleh sektor perhubungan dan pariwisata dikatakan efisien. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) proyek yang dilaksanakan rasio efisiensi yang dicapai kurang dari 1 (satu). Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Sektor Perhubungan dan Pariwisata dinilai berdasarkan hasil analisis varians dalam kondisi baik.

ABSTRACT
ANALYSIS ON THE EFFICIENCY
DEVELOPMENT BUDGET FROM
A COMMUNICATION AND TOURISM SECTOR

**A Case Study At the Offices of Communication and Tourism at
Local Government of Regency of Lembata of Province NTT**

MARIA MAGDALENA S. ELAN
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2006

The aim intention of this research was: (1) to assess the efficiency of the use of development budget on the of communication sector and tourism year 2003, (2) to assess the performance of Local Government of Regency Lembata specially communication and tourism sector year 2003.

The Research was conducted at Governmental Tourism and Communication board of Regency Lembata in June 2005. The data was collected using interview and documentation. The efficiency of the Use of budget of communication and tourism using the following stages; steps: (1) explaining the plan and budget realization used by communication sector and tourism, (2) determining inefficient or efficient use of budget of communication sector and tourism, (3) it was categorized as efficient if the ratio was less than 1 (one) or below/under 100%. The Governmental Performance of Regency Lembata for the communication sector and tourism was found out using the following stages: (1) reviewing the plan and realization of use of budget of communication sector and tourism, (2) comparing the difference between the actual performance and the budget, (3) if the budget was equal to the actual performance fact happened the (aktual), hence there's no difference and so it could be concluded as efficient.

The research concluded that the budget used by communication sector and tourism was efficient. It could be seen from 5 (five) project executed by a reached efficiency ratio less than 1 (one). Governmental Finance performance of Regency of Lembata of Communication Sector and Tourism was found in good condution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi sederhana yang berjudul “ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DARI SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA”. Skripsi yang penulis ajukan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, penulis secara tulus dan ikhlas menghaturkan limpah terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan kesabaran dan kasih sayang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itupada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J sebagai Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. Alex Kahu Lantum,MS sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, SE.,M.Si sebagai pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak A. Diksa Kuntara,SE sebagai pembimbing II untuk proposal, yang telah memberikan masukan bagi penulis.

5. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Y.Hartanto, M.Si.,Akt sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan sripsi ini.
6. Romo Dr. James J. Spillane, S.J. selaku dosen tamu.
7. Seluruh dosen jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas segala bimbingannya selama di bangku kuliah.
8. Staf sekretariat Fakultas Ekonomi atas bantuannya dalam kepengurusan administrasi.
9. Bapak Drs. Aloysius L. Wadu selaku kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dan seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
10. Bapak Gaspar B. Wahon yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan.
11. Kedua orang tuaku, adik-adikku serta seluruh keluargaku atas limpahan kasih sayang dan doa yang selalu kalian berikan kepadaku.
12. Yang tercinta Yoseph Horek Wahon (Oche) atas segala perhatian dan pengorbanan yang begitu besar.
13. Sahabat-sahabatku seangkatan '99 Sanata Dharma: Yosefa,Unna Diah, Yanti Kemaun, Ina Makin, Elfi Kwen, Elfien, Angki, Hans, Ika, Eli, Happy, Vivi, Louis, Henny Ladjar, Prim, juga teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabat seangkatan '99 Syuradikara: Ima duan, Ros Nggorong, Lon Fahik, Yanti, Jhon Kobun, Sani, juga teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

16. Keluarga besar IKALAYA dan TALA IA atas segala kebersamaan, bantuan dan dukungannya selama di Yogya.
17. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu makasih atas bantuan, kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2006

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	6
B. Efisiensi.....	14
C. Kinerja	16
D. Sektor Perhubungan dan Pariwisata di Kabupaten Lembata.....	19
BAB III METODA PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Subjek dan Objek Penelitian	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH	
KABUPATEN LEMBATA	27
A. Keadaan Geografis	28
B. Kekayaan Alam	29
C. Keadaan Penduduk	33
D. Pemerintahan	34
E. Sosial dan Ekonomi	35
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Deskripsi Data	37
B. Pembahasan dan Analisis Data	38
BAB VI PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Keterbatasan Penelitian	50
C. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Tabel III.1.	Analisis Varians	26
2. Tabel V.1.	Jumlah rencana anggaran belanja pembangunan daerah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, tahun anggaran 2003	40
3. Tabel V.2.	Jumlah realisasi anggaran pembangunan daerah Dinas Perhubungan dan pariwisata Kabupaten Lembata, tahun anggaran 2003	42
4. Tabel V.3	Analisis Varians	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan oleh Negara Indonesia sebagai salah satu sumber devisa selain migas. Pulau Bali merupakan daerah pariwisata utama yang sangat ramai dikunjungi. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keindahan alam dan lautan merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang ke Indonesia maka semakin meningkat pula devisa negara. Negara harus melihat peluang tersebut dengan memperhatikan potensi pariwisata daerah lain selain Bali. Untuk itu daerah lain diharapkan juga dapat meningkatkan peranannya dalam sektor pariwisata.

Lembata sebagai kabupaten baru, memiliki beraneka ragam potensi pariwisata berupa wisata budaya dan wisata alam yang belum dikembangkan dan dikemas sebagai obyek wisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya prasarana dan sarana dasar kepariwisataan pada lokasi obyek wisata. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lembata harus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki dan mengatasi tantangan yang dihadapi untuk memacu percepatan pembangunan. Kabupaten Lembata memiliki 59 objek wisata potensial yang terdiri dari 27 lokasi wisata budaya/sejarah, 29 lokasi wisata alam dan 3 lokasi kerajinan tangan. Potensi-potensi wisata tersebut antara lain

panorama alam dan sunset di pantai, air panas juga wisata budaya bahari yang saat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dan satu-satunya yang terdapat di dunia adalah penangkapan mamalia paus secara tradisional di Desa Lamalera.

Pariwisata erat berkaitan dengan sarana/prasarana perhubungan. Semakin meluas dan meningkatnya kualitas jaringan jalan raya, laut dan udara, maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya pula jumlah dan frekuensi orang yang melakukan perjalanan wisata. Pembangunan sarana/prasarana perhubungan seperti pelabuhan laut, bandar udara, jalan dan pengadaan sarana angkutan memerlukan waktu yang lama sebelum dapat dimanfaatkan. Sebaliknya arus manusia, barang dan jasa yang membutuhkan sarana/prasarana akan meningkat dengan cepat daripada laju pertumbuhan sarana/prasarana perhubungan itu sendiri. Dalam keadaan demikian pembangunan sektor perhubungan dan pariwisata tidak akan semata-mata menggunakan anggaran pemerintah, tetapi akan memanfaatkan juga modal swasta. Anggaran pemerintah akan lebih ditujukan bagi pembangunan sarana/prasarana perhubungan yang tidak menarik penyertaan modal swasta atau karena sifatnya harus dimiliki pemerintah (Spillane, 1987:100). Untuk itu pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin.

Setiap daerah tentu memiliki rencana anggaran tersendiri khususnya bagi sektor perhubungan dan pariwisata. Rencana anggaran ini yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Anggaran yang telah ditetapkan dipergunakan secara lebih efisien sehingga memperoleh hasil yang optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efisiensi penggunaan anggaran belanja pembangunan daerah sektor perhubungan dan pariwisata di Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2003?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata untuk sektor perhubungan dan pariwisata tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran belanja pembangunan daerah sektor perhubungan dan pariwisata di Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2003.
2. Untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lembata

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten khususnya dinas perhubungan dan pariwisata

sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan daerah yang lebih efisien.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Bagi penulis

Selain untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi juga untuk menambah pengetahuan khususnya tentang akuntansi sektor publik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran singkat tentang isi skripsi. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dan pembahasan selanjutnya serta sebagai dasar untuk mengolah data.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan mencakup jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 LEMBATA**

Bab ini menguraikan tentang keadaan geografi, kekayaan alam, keadaan penduduk, pemerintahan dan sosial.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, hasil pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh. Juga pembahasan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata dipandang dari sudut anggaran belanja pembangunan daerah sektor perhubungan dan pariwisata.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD

Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun (Suparmoko, 1987:149). Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode (SAK:No 23).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana penerimaan dan pengeluaran atau belanja daerah dalam jangka waktu tertentu (Suparmoko, 1987:149). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan daripada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang diukur dan dihitung dengan uang (Djoefri Abdulah, 1984:3).

2. Fungsi APBD

Fungsi dari APBD menurut Mamesah (1995:18) adalah:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

- c. Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

3. Bentuk dan Susunan APBD

Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi dua bagian pendapatan dan belanja. Pendapatan dalam APBD merupakan seluruh jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pendapatan daerah dan penerimaan pembangunan.

Sedangkan pengertian belanja dalam APBD adalah seluruh jenis pengeluaran yang digunakan untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan segala jenis pembelanjaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja pembangunan merupakan segala jenis pembelanjaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak terus menerus dan ada batas akhirnya sesuai dengan rencana.

Susunan APBD menurut Mamesah (1995:46-51) terdiri dari:

BAB I: PENDAPATAN

A. Pendapatan Daerah

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 2. Bagian pendapatan asli daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - d. Penerimaan dinas-dinas
 - e. Penerimaan lain-lain
 3. Bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - a. Pos bagi hasil pajak
 - b. Pos bagi hasil bukan pajak
 4. Bagian sumbangan dan bantuan
 - a. Pos sumbangan
 - b. Pos bantuan
- B. Penerimaan Pembangunan
1. Pinjaman pemerintah daerah
 2. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah
- C. Urusan Kas dan Perhitungan

BAB II: BELANJA

- A. Belanja Rutin
1. Belanja pegawai
 2. Belanja barang
 3. Belanja pemeliharaan
 4. Belanja perjalanan dinas

5. Belanja lain-lain
6. Angsuran pinjaman atau utang bunga
7. Belanja pensiun dan orderstand
8. Ganjaran atau subsidi atau sumbangan kepada daerah bawahan
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain
10. Pengeluaran tidak terduga

B. Belanja Pembangunan

1. Sektor pertanian dan pengairan
2. Sektor industri
3. Sektor pertambangan dan energi
4. Sektor perhubungan dan pariwisata
5. Sektor perdagangan dan koperasi
6. Sektor tenaga kerja dan pemukiman kembali
7. Sektor pembangunan daerah
8. Sektor agama
9. Sektor pendidikan, kebudayaan daerah dan kepercayaan kepada

TYME

10. Sektor kesehatan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan
11. Sektor perumahan rakyat
12. Sektor hukum
13. Sektor ketertiban dan keamanan
14. Sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial
15. Sektor IPTEK

16. Sektor aparatur pemerintah
17. Sektor pembangunan dunia usaha
18. Sektor sumber alam atau lingkungan hidup
19. Subsidi atau bantuan kepada daerah bawahan
20. pembayaran kembali pinjaman
21. Urusan kas dan perhitungan

4. Siklus Anggaran Daerah

Menurut Mamesah (1995:77) siklus anggaran daerah merupakan suatu proses mulai dari tahap awal (perencanaan anggaran) sampai dengan tahap akhir (perhitungan anggaran) yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Siklus anggaran daerah dibagi dalam empat tahap yaitu:

a. Penyusunan dan penetapan anggaran daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah. APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah. Proses penyusunan dan penetapan anggaran merupakan suatu kegiatan yang utuh dan terpadu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran.

Penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa prinsip seperti yang dikemukakan oleh Soetjipto dan Seno sebagai berikut:

1) Prinsip keterbukaan.

- 2) Prinsip periodik (biasanya satu tahun anggaran).
 - 3) Prinsip pembebanan anggaran pengeluaran, yang menguntungkan anggaran penerimaan.
 - 4) Prinsip fleksibilitas.
 - 5) Prinsip kecermatan.
 - 6) Prinsip kelengkapan atau universal.
 - 7) Prinsip prealabel.
 - 8) Prinsip komprehensif.
 - 9) Prinsip terinci.
 - 10) Prinsip pendapatan ajeg, kontinu, yaitu diusahakan agar pendapatan rutin dapat menutupi biaya rutin, sedang pendapatan pembangunan digunakan untuk belanja pembangunan.
- b. Pelaksanaan anggaran daerah.

Setelah anggaran mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPR, maka langkah selanjutnya merupakan kewajiban masing-masing lembaga dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui.

Pelaksanaan anggaran harus dijalankan secara rasional dan efisien, artinya pengeluaran harus dilaksanakan dengan sehemat-hematnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya pelaksanaan anggaran meliputi:

- 1) Pengeluaran
- 2) Penerimaan

- 3) Pengawasan
- 4) Pertanggungjawaban
- 5) Tata pembukuan
- 6) Pemecahan kesulitan dalam menghadapi ketidakcocokan.

c. Pengawasan dan pemeriksaan anggaran.

Pengawasan dan pemeriksaan memiliki arti dan peranan penting dalam siklus anggaran. Rencana yang telah disusun secara matang dan telah dilaksanakannya, tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan belum tentu dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal.

Pengawasan berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemborosan, tidak tepat waktu, dan sebagainya.

Pengawasan terhadap keuangan daerah dapat dilakukan melalui penelitian atas pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan dan disampaikan oleh pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengawasan dapat pula dilakukan melalui inspeksi dimana pengawas atau pemeriksa mendatangi tempat-tempat terjadinya aktivitas pelaksanaan keuangan daerah.

Pengawasan dan pemeriksaan anggaran daerah tidak terhadap pelaksanaan anggaran saja, tetapi mencakup perencanaan (penyusunan dan penetapan anggaran), pelaksanaan anggaran serta penyusunan dan penetapan perhitungan anggaran daerah.

d. Perhitungan anggaran daerah.

Sebagai siklus terakhir anggaran daerah, perhitungan atau pertanggungjawaban keuangan mempunyai arti yang luas. Bahwa seluruh kegiatan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan, baik menyangkut pendapatan maupun menyangkut pengeluaran yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPR serta kepada pemerintah atau pemerintah tingkat atasnya.

5. Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah (Halim, 2001:22–23).

Sistem akuntansi yang digunakan adalah *accrual basis* dimana dasar akuntansi ini mengakui transaksi pada saat transaksi terjadi.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota perhitungan APBD.
- c. Laporan aliran kas.
- d. Neraca Daerah.

6. Perlakuan Sisa Anggaran Belanja Pembangunan

Sisa perhitungan anggaran merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran berikutnya. Bagian dari sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu tercermin saat berakhirnya APBD suatu tahun anggaran dan pada saat dimulainya APBD tahun anggaran yang baru.

Pada saat dimulainya APBD tahun anggaran baru belum ada aktivitas-aktivitas penerimaan daerah, tetapi dalam kas daerah telah

tersedia uang kas atau uang tunai. Sisa perhitungan anggaran dimasukkan dalam APBD serta perhitungan APBD sebagai saldo awal, yaitu bagian pertama di sisi pendapatan berupa bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Pencantuman sisa anggaran dalam APBD masih bersifat angka perkiraan, sedang pada perhitungan APBD sudah merupakan anggaran yang pasti.

Sisa perhitungan anggaran untuk sektor-sektor pembangunan setelah realisasi dikembalikan ke kas daerah. Dari sisa-sisa anggaran dihitung yang kemudian akan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai saldo awal.

B. Efisiensi

1. Pengertian Efisiensi

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163) efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

Makin kecil sumber yang digunakan, dengan hasil yang optimal berarti makin efisien. Dengan demikian, efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil, atau masukan dengan keluaran. Makin kecil masukan yang dipakai atau makin besar keluaran yang dihasilkan, makin tinggi efisiensinya. Sumber atau biaya mencakup pula pengorbanan yang

tidak dapat diukur dengan uang, seperti kebosanan, kelelahan, kebisingan, hilangnya semangat kerja dan lain-lain.

Menurut Ensiklopedi Administrasi (1997:109) setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil mungkin dicapai, tetapi dengan penghamburan berupa pikiran, tenaga, waktu dan benda. Sedangkan setiap pekerjaan yang efisien juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan dari akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu tercapai.

Pengertian lain menurut Anthony, Dearden dan Bedford (1993:202), efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan, atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan.

2. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah.

Efisiensi anggaran belanja, dapat diartikan bagaimana usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan. Untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan sasarannya perlu dilakukan secara efisien dalam perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran.

Dalam peninjauan untuk mencapai efisiensi anggaran belanja, titik sentralnya ditekankan pada pengawasan preventif, dimana setiap pengeluaran yang akan dilakukan terlebih dahulu diteliti dengan cermat. Apakah pengeluaran-pengeluaran dapat dihabiskan tepat pada waktunya, kemudian diperhitungkan dengan beberapa pengorbanan yang dikeluarkan

dan berapa hasil yang akan diperoleh atau dinikmati dari pengeluaran. Tidak dapat dilupakan faktor standarisasi pengeluaran harus diperhitungkan, serta apakah suatu pengeluaran ditemui skala prioritasnya.

Pengawasan dalam pelaksanaan anggaran memiliki peranan sangat penting. Walaupun rencana sudah disusun matang dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal tanpa adanya pengawasan.

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi dimasa yang akan datang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi.

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada di dalam organisasi (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002:9).

Evaluasi kinerja mengandung pengertian bahwa pihak yang berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan harus melaporkan penerapan tolok ukur pengukuran kinerja. Pelaksanaannya melalui analisis kegiatan unit instansi pemerintah yang membandingkan antara realisasi dan rencana (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002:1).

2. Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1993:419).

Penilaian Kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran di dalam organisasi. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan agar mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan apa yang diinginkan.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja, dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme *reward* dan *punishment*. Sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Penilaian kinerja dan mekanisme *reward* dan *punishment* harus didukung dengan manajemen kompensasi yang

memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002:58).

3. Maksud Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yakni:

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, agar dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

4. Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Mardiasmo(2002:122):

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian hasil yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

D. Sektor Perhubungan dan Pariwisata di Kabupaten Lembata

1. Visi

Terciptanya sistem jaringan transportasi sebagai urat nadi perekonomian dan terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berbasis perekonomian rakyat, untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperkuat otonomi daerah.

2. Misi

- a. Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik di bidang perhubungan baik darat, laut, udara maupun pariwisata.
- b. Meningkatkan keteraturan, ketertiban, keamanan dan keselamatan bagi penyedia maupun pengguna jasa angkutan darat, laut dan udara.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparatur yang profesional.

- d. Menciptakan budaya sapa pesona bagi setiap stakeholder kepariwisataan di daerah.
- e. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat.

3. Tujuan

- a. Memperlancar arus mobilisasi dan interaksi orang serta memperlancar distribusi barang maupun jasa.
- b. Membuka isolasi daerah dari dunia luar.
- c. Menjadikan Daerah Lembata sebagai daerah tujuan wisata.
- d. Membangun perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan
- e. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur.

4. Sasaran

- a. Sub bidang perhubungan darat.
 - 1) Terbangunnya sarana dan fasilitas angkutan jalan raya.
 - 2) Terbangunnya infrastruktur jalan yang terkait dalam dan dengan moda-moda transportase.
 - 3) Terbangunnya armada angkutan jalan raya yang tertib dan teratur.
 - 4) Terdidiknya aparatur perhubungan yang bermental dan bermoral pengabdian.
- b. Sub bidang perhubungan laut.

- 1) Terbangunnya sarana, prasarana dan fasilitas pelabuhan laut sebagai pintu gerbang perdagangan antar daerah maupun antar pulau.
- 2) Tersedianya tenaga aparatur yang terlatih dan terampil dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

c. Sub bidang perhubungan udara

- 1) Terbangunnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan udara yang memadai.
- 2) Tersedianya tenaga aparatur perhubungan udara yang terampil dan terlatih.

d. Sub bidang kepariwisataan

- 1) Terbangunnya suatu sistem perekonomian yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.
- 2) Meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal, nusantara dan manca negara.
- 3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur.

5. Tugas Pokok

Membantu bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan dan pariwisata.

6. Fungsi

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

- b) Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.
- c) Perumusan kebijakan operasional, pemberian bimbingan, pengawasan dan perijinan di bidang perhubungan dan pariwisata serta promosi wisata sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan pelaksanaan program perhubungan dan pariwisata.
- e) Pembinaan teknis di bidang perhubungan dan pariwisata berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri serta pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.
- f) Koordinasi pembinaan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan pariwisata.
- g) Pengelolaan unit pelaksanaan teknis daerah.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, yaitu peneliti mengadakan penelitian terhadap obyek dan data tertentu pada waktu tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang bersangkutan dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pada bulan Mei-Juni 2005.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian:

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Obyek penelitian:

Laporan rencana dan realisasi anggaran belanja pembangunan sektor perhubungan dan pariwisata tahun 2003.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil studi ini akan diperoleh tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahannya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini diutamakan untuk mengumpulkan data dari unit pemerintah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberi keterangan secara obyektif mengenai anggaran belanja pembangunan daerah sektor perhubungan dan pariwisata.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen yang berhubungan dengan rencana dan realisasi anggaran belanja pembangunan daerah sektor perhubungan dan pariwisata.

E. Teknik Analisis Data

Permasalahan yang telah diungkapkan dalam bab I, penyelesaiannya dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang digunakan untuk permasalahan pertama, yakni:



a. Memaparkan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan oleh sektor perhubungan dan pariwisata.

b. Melakukan analisis penggunaan anggaran.

Analisis yang ditentukan untuk menilai efisien atau tidak efisien penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata adalah dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi anggaran.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{rencana anggaran}}{\text{realisasi anggaran}}$$

c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis.

Dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100% (Halim, 2001: 264). Semakin kecil rasio efisiensi berarti penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata semakin baik. Tetapi jika rasionya lebih dari 1 (satu) atau di atas 100% maka dikategorikan tidak efisien.

2. Langkah-langkah yang digunakan untuk permasalahan kedua, yakni:

a. Melihat kembali rencana dan realisasi penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata yang telah dipaparkan dalam permasalahan pertama.

b. Melakukan analisis kinerja pemerintah kabupaten sektor perhubungan dan pariwisata.

Tolak ukur pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis varians.

Analisis varians dilakukan dengan membandingkan selisih atau

perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:123).

Dari hasil analisis varians, kemudian dinyatakan dalam bentuk

$$\text{persentase: } \frac{\text{selisih anggaran}}{\text{rencana anggaran}} \times 100\%$$

- c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis varians, yaitu: (Susilo, 2003:32-33)
- 1) Jika anggaran lebih besar daripada sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat menguntungkan.
 - 2) Jika anggaran sama dengan sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya sama dengan 0 (nol) dan dikatakan efisien. Artinya bahwa untuk mencapai suatu tujuan dengan biaya yang seminimal mungkin dan dalam waktu atau periode yang sesingkat-singkatnya, tetapi diharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Jika dikaitkan dengan efisiensi anggaran belanja, dapat diartikan bagaimana usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan.
 - 3) Jika anggaran lebih kecil daripada sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan.

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Tabel III.1.

Analisis Varians

No	URAIAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	VARIANS (selisih)	%	KESIMPULAN

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang termasuk dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Lembata terletak diantara $8^{\circ}15'$ sampai $8^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $123^{\circ}15'$ sampai 124° Bujur Timur. Secara geografis letaknya berbatasan antara lain dengan Laut Flores di sebelah Utara, Laut Sawu di sebelah Selatan, Kabupaten Alor di sebelah Timur dan Kabupaten Flores Timur di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Lembata kira-kira $1.266,38 \text{ km}^2$ dengan topografi 92 desa berbukit-bukit, 20 desa dataran dan 5 kelurahan dataran. Luas lautannya kira-kira $3.353,995 \text{ km}^2$.

Curah hujan dan suhu di Kabupaten Lembata:

- Iklim tropis
- Rata-rata curah hujan per tahun = 500 – 1.200 mm
- Rata-rata hari hujan per tahun = 60 – 150 hari
- Kelembaban udara = 72% – 84%
- Bulan basah = 2 – 4 bulan
- Bulan kering = 8 – 10 bulan
- Suhu udara: maksimum = 30° – 33°C
- minimum = 20° – 24°C
- Kecepatan angin rata-rata = 8,41 knot

B. Kekayaan Alam

Kabupaten Lembata ternyata memiliki kekayaan potensi sumber daya alam, baik potensi sumber daya alam tanah, sumber daya alam hutan maupun sumber daya alam kelautan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan nasional khususnya pembangunan masyarakat Lembata.

Selain memiliki kekayaan potensi sumber daya alam, Kabupaten Lembata juga memiliki beraneka ragam potensi pariwisata dan seni budaya. Semua itu bila dikelola secara baik dan profesional akan memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi.

Beraneka ragam kekayaan potensi sumber daya alam, kekayaan potensi pariwisata dan seni budaya yang dimiliki tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pertanian.

a. Tanaman pangan

Dengan luas potensi: lahan kering 58.252 ha, dan lahan basah 720 ha dengan potensi pengembangan: padi sawah, padi gogo, jagung dan kacang-kacangan.

b. Peternakan.

Dengan luas potensi lahan 19.038,78 ha, potensi ternak yang sedang dikembangkan: sapi, kambing, babi dan ayam.

c. Perkebunan.

Dengan potensi lahan 26.553,65 ha. Komoditi yang sedang dan akan terus dikembangkan: kemiri, kelapa, jambu mete, kopi, kakao, cengkeh, vanili dan lada.

d. Perikanan dan kelautan.

Luas wilayah laut 3.393,395 km² dan panjang garis pantai 492,80 KM² dengan potensi: ikan-ikan pelagis, ikan-ikan domersal, lobster, nener, cumi-cumi, teripang, kerang mutiara, kerang anadra, siput dan rumput laut.

e. Kehutanan.

Luas areal hutan: 36.484 ha dan tanaman yang dikembangkan saat ini: jati super, jati emas, camelina, bambu, dan lain-lain.

2. Pertambangan

a. Bahan galian golongan A

1) Panas bumi:

- Sumur ATD 1 lokasi Kneping kedalaman 250,8 M, dengan temperatur: 106,2°C
- Sumur ATD 2 lokasi Watuwawer kedalaman 250 M, dengan temperatur 39,9°C

2) Timah hitam di Balauring dan Tapolangu.

- b. Bahan galian golongan B: emas (Wagpue-Buyasuri), tembaga (Hadakewa, Waienga, Merenwang), besi (Leur dan Tobotani) dan barit (Bean dan Atanila).

- c. Bahan galian golongan C: batu gamping, andesit dan gasit, tras, toseki, sirtu, pasir dan batu apung (tersebar hampir di semua kecamatan).

3. Pariwisata

Terdapat 59 objek wisata potensial yang terdiri dari 27 lokasi wisata budaya/sejarah, 29 lokasi wisata alam, tiga lokasi kerajinan tangan.

Potensi-potensi pariwisata tersebut antara lain:

a. Potensi Wisata Alam

1) Pulau Pasir Putih Awololong

Memiliki keunikan yang khas yaitu pulau tersebut hanya muncul pada saat terjadi pasang surut, dan wisatawan dapat memperoleh siput/kerang dengan cara mengorek atau menggali pasir sedalam 5-10 cm. Keseluruhan pulau tersebut mengandung berbagai jenis siput/kerang, maka pulau ini sering disebut Pulau Siput.

2) Pantai Rekreasi Waijarang

Di tempat tersebut cocok bagi wisatawan untuk menikmati wisata pantai seperti: berenang, berjemur, kemping, haiking serta wisatawan dapat dihibur dengan menikmati atraksi-atraksi budaya. Wisatawan juga dapat berlayar dengan perahu untuk menikmati panorama pantai dan bukit yang indah.

3) Sumber Air Panas Sabutobo

Wisatawan dapat menemukan sumber mata air panas yang keluar dari tebing dan melalui akar-akar pohon sebanyak 4 (empat) mata air. Sumber air panas tersebut sangat unik karena dapat langsung

dikonsumsi untuk diminum dan mandi, tempat istirahat/rekreasi diakhir pekan dan dapat dijadikan tempat pemandian yang menyegarkan.

4) Pantai Rekreasi dan Taman Laut Tanah Treket

Sebagian pantai di sebelah timur berpasir putih yang cocok untuk mandi dan berenang serta menjemur dan di sebelah barat untuk olahraga dayung. Di pantai ini juga wisatawan dapat berenang karena memiliki taman laut dan terumbu karang yang indah.

5) Pantai Pasir Putih Mingar

Merupakan obyek wisata yang sangat menarik bagi wisatawan untuk berselancar karena mempunyai gelombang yang tinggi. Disamping itu pula wisatawan dapat mandi dan berjemur diatas pasir putih, berlayar dan mendayung. Salah satu keunikan pantai tersebut adalah dipesisir pantai sering ditemui penyu yang sedang bertelur terutama pada saat bulan terang dan penangkapan Nale (sejenis cacing laut yang dapat dimakan) secara tradisional.

6) Pantai Lewolein

Di pantai ini ditumbuhi pohon bakau yang rindang, pohon kelapa dan terbentang pasir putih keabu-abuan dengan ombak yang tenang sangat cocok untuk mandi, berenang dan berjemur.

7) Pantai Pasir Putih Bean

Pantai pasir putih yang unik dalam bentuk kristal-kristal halus dengan ombak laut yang bergulung terus menerus. Wisatawan

dapat melakukan kegiatan wisata seperti panjat tebing, fotografi dan bersantai ria di bawah pohon-pohon pelindung yang sejuk dan indah.

b. Potensi Wisata Budaya dan Purbakala

1) Perburuan Ikan Paus Tradisional di Desa Lamalera

Wisatawan dapat menikmati obyek wisata budaya dan bahari yakni perburuan ikan paus secara tradisional yang hanya satu-satunya di dunia dengan mempergunakan peralatan tradisional seperti peledang (perahu kayu tanpa mesin dengan menggunakan layar) dan tempuling (tombak yang ujungnya berkait yang terbuat dari baja yang digunakan untuk menikam ikan paus).

2) Rumah Adat dan Ritus Pesta Kacang Jontona

Di ketinggian gunung Ileape terdapat kampung tua dengan kompleks rumah adat dimana masing-masing rumah adat mempunyai kelengkapan untuk upacara adat seperti keramik, gading. Di sini setiap tahunnya selalu diadakan upacara Sora Utana atau pesta makan kacang yang unik yang terpusat pada rumah-rumah adat.

3) Proses Tenun Ikat Tradisional di Lamatokan

Di Lamatokan wisatawan dapat menyaksikan proses pembuatan tenun ikat yang masih tradisional.

C. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk = 103.509 jiwa terdiri dari:

- Laki-laki = 45.809 jiwa (44%)
- Perempuan = 57.707 jiwa (56%)

Jumlah penduduk miskin 82.105 jiwa atau 79% dari total penduduk sebanyak 103.509 jiwa. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, fluktuasi dan nilai tukar (harga) komoditi hasil pertanian menyebabkan ketidakpastian tingkat pendapatan masyarakat pertanian (petani, peternak, nelayan) dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan antara lain karena tingkat kepemilikan asset/harta kekayaan ekonomi masyarakat sangat terbatas dan skala usahanya masih kecil.

Pendapatan per kapita masyarakat Lembata per tahun yang masih rendah tersebut digambarkan sebagai berikut:

- Tahun 2000 Rp1.010.127.
- Tahun 2001 Rp1.127.882.
- Tahun 2002 Rp1.260.350.
- Tahun 2003 Rp1.356.892.

D. Pemerintahan

Sejak tahun 1958 Pulau Lembata merupakan bagian wilayah administrative Kabupaten Flores Timur. Tanggal 12 Oktober 1999 Lembata dipisahkan dan menjadi sebuah kabupaten baru dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Lembata dengan ibu kotanya Lembata.

Kabupaten Lembata menjadi daerah yang otonom, ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 52 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

Kabupaten Lembata membawai delapan kecamatan yaitu:

1. Buyasuri = 18 desa
2. Omesuri = 19 desa
3. Lebatukan = 13 desa
4. Ile Ape = 21 desa
5. Nubatukan = 7 desa + 5 kelurahan
6. Atadei = 12 desa
7. Nagawutun = 11 desa
8. Wulandoni = 11 desa

Kemampuan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Lembata masih rendah antara lain keuangan daerah, PAD tahun 2001 sebesar Rp1.700.000.000. dan PAD tahun 2002 sebesar Rp3.290.000.000. Sedangkan PAD tahun 2003 sebesar Rp4000.000.000.

E. Sosial dan Ekonomi

1. Pendidikan

Dari 453.051 angkatan kerja Kabupaten Lembata 86,10% atau 37.063 orang berpendidikan SD ke bawah. Kondisi ini membutuhkan penanganan secara lintas sektoral sehingga dapat lebih mempercepat peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam upaya pemberdayaan

masyarakat untuk membangun diri dan masa depannya. SDM aparatur di Kabupaten Lembata sebanyak 2.195 orang, terdiri dari sarjana 256 orang (12%), Sarjana Muda/DIII/DII/DI 229 orang (10%), SLTA 1.594 orang (74%), SLTP 56 orang (3%) dan SD 50 orang (2%).

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat Lembata juga masih rendah. Kondisi ini diindikasikan dengan angka kematian bayi 40/2.135 kelahiran bayi; angka kematian ibu 350/100.000 ibu melahirkan; status gizi buruk 1,5% dan usia harapan hidup 59 tahun.

3. Agama

Penduduk Kabupaten Lembata mayoritas beragama Katolik dan penduduk yang lainnya merupakan minoritas. Kerukunan hidup umat beragama sangat dijaga sehingga tidak terjadi perselisihan.

Jumlah penduduk menurut agama:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| a. Katolik | = 81.286 orang (78,53%) |
| b. Islam | = 21.677 orang (20,94%) |
| c. Protestan | = 523 orang (0,51%) |
| d. Hindu | = 23 orang (0,02%) |
| e. Lainnya | = — |

4. Sosial lainnya

Partisipasi dan peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan (parpol, LSM, swasta, dan lain-lain) dalam membangun kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Lembaga-lembaga ini masih menitikberatkan pada fungsi

kontrol sosial pembangunan ke depan. Lembaga-lembaga ini harus difasilitasi oleh pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat dalam membangun masa depan dan kesejahteraannya. (Manuk; 2002:6)

5. Ekonomi

Struktur ekonomi masih pada sektor primer (pertanian) sebesar 55,98%, sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air dan bangunan) sebesar 3,95% dan sektor tersier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa) sebesar 40,07%. Sistem ekonomi masih transisional dan tingkat hidup masyarakat masih bersifat sub sistem (kurangnya nilai tambah hasil produksi masyarakat).

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lembata. Sumber data yang menjadi dasar dari penelitian adalah data yang berasal dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Data tersebut berupa lembar kerja yang berisi uraian perhitungan pengeluaran untuk tiap-tiap proyek serta laporan rencana dan realisasi anggaran proyek perhubungan dan pariwisata untuk tahun anggaran 2003. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran belanja pembangunan daerah dan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata.

Data yang dimaksudkan dalam penelitian adalah:

1. Lembar kerja merupakan petunjuk pelaksanaan proyek yang isinya meliputi:
 - a. Tahun anggaran, bidang pemerintahan, perangkat daerah, program, kegiatan, sifat kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana, kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan, waktu pelaksanaan kegiatan dan pengendali pelaksanaan kegiatan.
 - b. Indikator dan tolok ukur belanja langsung:
 - 1) Indikator: masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
 - 2) Tolok ukur kinerja

- 3) Target kinerja
- c. Anggaran belanja langsung/kegiatan yang terdiri dari kode rekening, uraian, unit/satuan, harga satuan dan jumlah harga.
- d. Rencana belanja langsung per triwulan
- e. Tim anggaran eksekutif:
 - 1) Nama dan NIP
 - 2) Jabatan: Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Kepala BAPPEDA dan Kepala DISPENDA.
 - 3) Jabatan dalam tim: ketua, wakil ketua I, wakil ketua II dan wakil ketua III.
 - 4) Tanda tangan
2. Rencana anggaran yang terdiri dari: judul program dan kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana, jumlah (Rp).
3. Realisasi anggaran yang berisi besarnya dana yang digunakan selama penyelesaian proyek.

B. Pembahasan dan Analisis Data

Untuk menjawab masalah-masalah seperti yang diungkapkan dalam bab I maka berikut ini dilakukan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian.

1. Rencana dan Realisasi Anggaran

Tahun 2003 program kerja Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata terdiri dari 5 (lima) proyek. Proyek-

proyek tersebut antara lain Pembangunan Terminal Timur dan Barat, Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara, Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata, Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang, serta Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang. Pemerintah Kabupaten Lembata menyediakan dana untuk sektor perhubungan dan pariwisata sebesar Rp1.993.910.650. Dana tersebut kemudian dialokasikan ke setiap proyek.

Prioritas perencanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran meliputi tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Kinerja pemerintah kabupaten sangat menentukan terlaksananya proyek-proyek tersebut, sehingga dapat memberikan hasil, manfaat, dan dampak baik bagi pemerintah kabupaten maupun bagi masyarakat Lembata sendiri.

Hasil dari suatu perencanaan belum merupakan tujuan akhir, tetapi masih diperlukan sederetan langkah-langkah yang perlu dihadapi dan diselesaikan. APBD yang telah disahkan ditetapkan menjadi peraturan daerah masih harus dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, tertib dan disiplin.

Penggunaan anggaran disesuaikan dengan jenis pengeluaran yang dibutuhkan. Biaya proyek perhubungan dan pariwisata dirinci menjadi empat bagian yaitu gaji/upah, barang dan jasa, perjalanan dinas dan belanja modal. Keempat rincian tersebut diuraikan menjadi beberapa jenis

biaya sesuai kebutuhan proyek. Uraian anggaran pengeluaran proyek perhubungan dan pariwisata tahun anggaran 2003 terdapat pada lampiran lembar kerja.

Data rencana dan realisasi anggaran yang diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan nama proyek.

Tabel V.1
Jumlah rencana anggaran belanja pembangunan daerah
Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Lembata, tahun anggaran 2003

NO	Nama Proyek	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Pembangunan Terminal Timur dan Barat	1.347.025.000	DASK
2.	Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara.	205.000.000	DASK
3.	Penyusunan RTRK Pengembangan Pariwisata.	281.331.200	DASK
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang.	127.189.450	DASK
5.	Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang.	33.365.000	DASK

Sumber data : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata

Rencana anggaran tersebut kemudian dibagi dalam per triwulan sebagai berikut:

Proyek Pembangunan Terminal Timur dan Barat rencana anggaran untuk per triwulannya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Triwulan I | Rp 269.405.000. |
| 2. Triwulan II | 404.107.600. |
| 3. Triwulan III | 404.107.600. |
| 4. Triwulan IV | <u>269.405.000.</u> |

Total Rp1.347.025.000.

Proyek Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara rencana anggaran untuk per triwulannya:

1. Triwulan I	Rp 41.000.000.
2. Triwulan II	61.500.000.
3. Triwulan III	61.500.000.
4. Triwulan IV	<u>41.000.000.</u>

Total Rp205.000.000.

Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata rencana anggaran untuk per triwulannya:

1. Triwulan I	Rp 56.266.240.
2. Triwulan II	84.399.360.
3. Triwulan III	84.399.360.
4. Triwulan IV	<u>56.266.240.</u>

Total Rp281.331.200.

Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Wajjarang rencana anggaran untuk per triwulannya:

1. Triwulan I	Rp 25.437.890.
2. Triwulan II	38.156.835.
3. Triwulan III	38.156.835.
4. Triwulan IV	<u>25.437.890.</u>

Total Rp 127.189.450.

Proyek Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang rencana anggaran untuk per triwulannya:

1. Triwulan I	Rp 6.673.000.
2. Triwulan II	10.000.500.
3. Triwulan III	10.000.500.
4. Triwulan IV	<u>6.673.000.</u>
Total Rp33.365.000.	

Tabel V.2
Jumlah realisasi anggaran belanja pembangunan daerah
Dinas Perhubungan dan pariwisata
Kabupaten Lembata, tahun anggaran 2003

NO	Nama Proyek	Realisasi anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Terminal Timur dan Barat.	423.610.000.
2.	Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara.	184.920.000.
3.	Penyusunan RTRK Pengembangan Pariwisata.	162.435.000.
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang.	49.584.228.
5.	Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang	33.365.000.

Sumber data : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata

Sisa perhitungan anggaran setelah realisasi akan dikembalikan ke kas daerah, dengan perinciannya sebagai berikut:

Proyek Pembangunan Terminal Timur dan Barat rencana anggaran sebesar Rp1.347.025. dengan realisasi anggaran sebesar Rp423.610.000. maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp923.415.000. yang kemudian dikembalikan ke kas daerah. Pada Proyek Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara rencana anggaran sebesar Rp205.000.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.920.000. maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.080.000. yang kemudian dikembalikan ke kas daerah. Proyek

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata rencana anggaran sebesar Rp81.331.200. dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.896.200. yang kemudian dikembalikan ke kas daerah. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang rencana anggaran sebesar Rp127.189.450. dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.584.228. maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp77.605.222. yang kemudian dikembalikan ke kas daerah. Proyek Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang rencana anggaran sebesar Rp31.300.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp31.300.000. maka tidak terdapat sisa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah.

Setelah mengetahui besarnya rencana dan realisasi anggaran untuk setiap proyek, maka dilakukan analisis data.

2. Analisis Penggunaan Anggaran

Analisis ini digunakan untuk mengukur rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran pada setiap proyek digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{rencana anggaran}}{\text{realisasi anggaran}}$$

Contoh perhitungan:

$$\text{Rasio efisiensi proyek 1} = \frac{1.347.025.000}{423.610.000} = 3,18 \text{ atau } 318\%$$

Rasio efisiensinya sebesar 3,18 artinya rasio yang dicapai lebih dari 1, maka penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata untuk

proyek Pembangunan Terminal Timur dan Barat dikatakan tidak efisien. Rasio efisiensi sebesar 318% menggambarkan Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata tidak berhasil merealisasikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio efisiensi proyek 2} = \frac{205.000.000}{184.920.000} = 1,11 \text{ atau } 111\%$$

Rasio efisiensinya sebesar 1,11 artinya rasio yang dicapai lebih dari 1, maka penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata untuk proyek Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara dikatakan tidak efisien. Rasio efisiensi sebesar 111% menggambarkan Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata tidak berhasil merealisasikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio efisiensi proyek 3} = \frac{281.331.200}{162.435.000} = 1,73 \text{ atau } 173\%$$

Rasio efisiensinya sebesar 1,73 artinya rasio yang dicapai lebih dari 1, maka penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata untuk proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata dikatakan tidak efisien. Rasio efisiensi sebesar 173% menggambarkan Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata tidak berhasil merealisasikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio efisiensi proyek 4} = \frac{127.189.450}{49.584.228} = 2,57 \text{ atau } 257\%$$

Rasio efisiensinya sebesar 2,57 artinya rasio yang dicapai lebih dari 1, maka penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata untuk proyek Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang dikatakan tidak efisien. Rasio efisiensi sebesar 257% menggambarkan Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata tidak berhasil merealisasikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan target yang di tetapkan.

$$\text{Rasio efisiensi proyek 5} = \frac{33.365.000}{33.365.000} = 1,00 \text{ atau } 100\%$$

Rasio efisiensi penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata untuk proyek Pengembangan Sumber Daya Sarana Penunjang sebesar 1,00 maka dikatakan efisien. Rasio efisiensi sebesar 100% menggambarkan Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata berhasil merealisasikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan target yang di tetapkan.

3. Analisis Kinerja

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa

uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. (Mardiasmo 202:121)

Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (*Cost Of Service*) yang dibebakan kepada masyarakat pengguna jasa-jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus-menerus ditarik pungutan, sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Masyarakat meghendaki pemerintah dapat memberikan pelayanan dengan biaya yang murah (*do more with less*) (Mardiasmo 2002:121-122).

Setelah mengetahui besarnya rencana dan realisasi anggaran untuk setiap proyek, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata sektor perhubungan dan pariwisata dapat diketahui dengan cara mencari selisih antara rencana dan realisasi anggaran. Berikut adalah hasil analisis varians pada ringkasan perhitungan rencana dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lembata sektor perhubungan dan pariwisata.

Tabel V.3
Analisis Varians

No	Nama Proyek	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Varians (Rencana-Realisasi)	% (Varians: Rencana)	Kesimpulan
1.	Pembangunan Terminal Timur dan barat.	1.347.025.000.	423.610.000.	923.415.000.	0,69	Menguntungkan
2.	Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara.	205.000.000.	184.920.000.	20.080.000.	0,10	Menguntungkan
3.	Penyusunan RTRK Pengemb. Pariwisata.	281.331.200.	162.435.000.	118.896.200.	0,42	Menguntungkan
4.	Pengelolaan dan Pengb. Obyek Wisata.	127.189.450.	49.584.228.	77.605.222.	0,61	Menguntungkan
5.	Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang.	33.365.000.	33.365.000.	0	100	Efisien

Pembangunan Terminal Timur dan Barat terdapat varians sebesar Rp923.415.000. bersifat menguntungkan. Pada proyek Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara varians sebesar Rp20.080.000. bersifat menguntungkan. Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata varians sebesar Rp118.896.200. bersifat menguntungkan. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang varians sebesar Rp77.605.222. juga bersifat menguntungkan. Proyek terakhir Pengembangan Sumber Daya Sarana Penunjang tidak terdapat varians sehingga diperoleh kesimpulan efisien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata dikatakan tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) proyek/program kerja yang dilaksanakan terdapat 4 (empat) proyek/program kerja yang tidak efisien, dimana rasio efisiensi yang dicapai kurang dari 1 (satu). Proyek-proyek tersebut terdiri dari proyek Pembangunan Terminal Timur dan Barat dengan rasio 3,18; proyek Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara dengan rasio 1,11; proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata dengan rasio 1,73 dan proyek Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang dengan rasio 2,57. Sedangkan untuk proyek Pengembangan Sumber Daya Sarana Penunjang rasio efisiensinya 1 (satu) maka dikatakan efisien.
2. Perencanaan yang baik belumlah menjamin suatu hasil yang diinginkan. Dengan kata lain dari 5 (lima) proyek yang dilaksanakan tidak semuanya 100% dapat terselesaikan. Dimana terdapat 2 (dua) proyek yang belum selesai tepat waktu: pertama proyek Pembangunan Terminal Timur 89,57% dan Pembangunan Terminal Barat 94,87%; kedua proyek



Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang dengan realisasi fisik 98,35%.

3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata sektor perhubungan dan pariwisata dinilai berdasarkan hasil analisis varians. Pada proyek Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang tidak terdapat varians antara rencana anggaran dan realisasi anggaran sehingga dapat ditarik kesimpulan efisien. Untuk proyek Pembangunan Terminal Timur dan Barat, proyek Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara, proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata serta proyek Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang bersifat menguntungkan. Dengan demikian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata sektor perhubungan dan pariwisata dalam kondisi baik, hal ini tercermin pada tabel V.3.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan hanya pada tahun 2003 sehingga mungkin akan berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang dan dimasa yang akan datang.
2. Untuk dapat menentukan batasan efisiensi, penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim (2001: 264), yaitu batasan tingkat efisiensi jika mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi tingkat efisiensi atau lebih dari 1(satu) maka penggunaan anggaran sektor perhubungan dan pariwisata dikategorikan tidak efisien.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Lembata maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan sektor perhubungan dan pariwisata di Kabupaten Lembata.

Saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata perlu menetapkan ukuran yang pasti dalam menentukan efisiensi anggaran dan penilaian kinerja. Hal ini penting dilakukan mengingat anggaran yang digunakan selama tahun 2003 pada umumnya tidak efisien karena tidak adanya ukuran yang menjadi patokan dalam penggunaan anggaran dan target kinerja.
2. Kinerja keuangan sektor perhubungan dan pariwisata yang dalam kondisi baik (tercermin pada tabel V.3.) perlu dipertahankan serta berusaha untuk meningkatkannya.
3. Pemerintah Kabupaten Lembata khususnya sektor perhubungan dan pariwisata dalam membuat rencana anggaran terlebih dahulu perlu menyesuaikan dengan harga pasar sehingga tidak terjadi perbedaan yang cukup besar antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran.
4. Bagi peneliti selanjutnya penting untuk menganalisis sebab-sebab tidak efisiennya anggaran yang digunakan oleh sektor perhubungan dan pariwisata (selain dikarenakan tidak adanya ukuran yang pasti dalam

menentukan efisiensi anggaran). Sehingga dapat dijadikan masukan dalam mengelola anggaran dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Djoefri, 1994. *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*. Jakarta: Cipta Rukun sarana.
- Anthony, Robert N., John Dearden, dan Norton M. Bedford 1992, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Binaputra Aksara.
- Bastian, Indra 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE – UGM.
- Halim, Abdul, 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002. *Penetapan Indikator Kinerja Secara Mandiri : Refleksi Partisipasi Internal Organisasi*. Yogyakarta : Makalah Seminar Nasional, 6 Juli.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1995. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mamesah, D.J, 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manuk, A.D. 2002. *Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Lambata sebagai Daerah Otonom*. Lambata: Makalah Seminar Nasional, 21 Juli.
- Mardiasmo, 2002. *Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Pubik : Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Kebutuhan Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Makalah Seminar Nasional, 6 juli.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suparmoko, M, 1987. *Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE.
- Sulsilo, Damasus N. 2003. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Skripsi S1. yogyakarta: USD.
- Spillane, J, 1987. *Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Staf Dosen BPA UGM, 1997. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.

- _____, 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jilid I. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- _____, 2003. *Dokumen Anggaran Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun 2003*. Lembata.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Jln. Trans Lembata Telp. (0383) 41521

SURAT KETERANGAN

Nomor : 408/550/DISHUBPAR/XI/2005

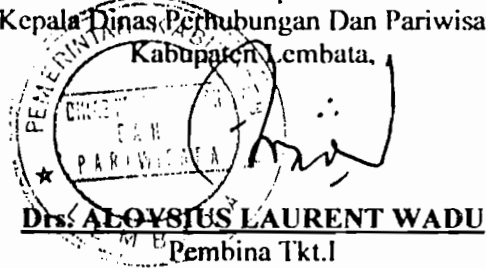
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maria Magdalena S. Elan
NIM : 992114141
Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei 2005 sampai dengan tanggal 25 Juni 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lewolba, 11 Nopember 2006
Kepala Dinas Perhubungan Dan Pariwisata
Kabupaten Lembata,


Drs. ALOYSIUS LAURENT WADU
Pembina Tkt.I
NIP.620 015 481

DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

DAFTAR ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
SATUAN KERJA

D3 B1.1

Tahun Anggaran : 2003
 Bidang Pemerintahan : Perhubungan
 Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan dan Pariwisata
 Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Darat.
 Kegiatan : Pembangunan Terminal Timur dan Barat
 Sub Kegiatan : Baru
 Lokasi Kegiatan : Lewoleba - Kecamatan Nubatukan
 Sumber Dana : DAU
 Kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan : Tidak teraturnya lalulintas sebagai akibat daya tampung terminal kota yang tidak memadai untuk menampung + 125 angkutan umum perkotaan maupun pedesaan.
 Waktu pelaks. Kegiatan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender
 Pengendali pelaksanaan kegiatan :
 Nama :
 Jabatan :

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR BELANJA LANGSUNG

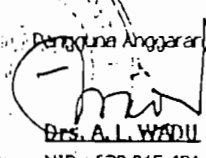
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan Kegiatan	Biaya Pembangunan Terminal Timur	Rp 1.347.025.000
Keluaran	Bangunan Terminal Timur dan Barat	
Hasil	Tersedianya bangunan terminal untuk angkutan kota dan pedesaan dari arah Timur dan Barat	2 Buah
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengaturan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan serta meningkatnya tata tertib dan disiplin penyedia / pengguna jasa atas fasilitas umum dan - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 	
Dampak	Terjaminnya kelancaran lalulintas angkutan darat, bongkar muat barang dan arus penumpang	

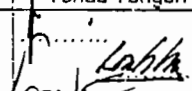


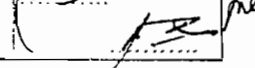
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG / KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Unit / Satuan	Harga Satuan	Jml Harga
2 16 01	2 PELAYANAN PUBLIK			
2 16 01 2	2 BELANJA OPERASIONAL DAN PEM.			
2 16 01 2 1	2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			
2 16 01 2 1 01	2 Honorarium / Upah			
2 16 01 2 1 01 01	2 Honorarium Tim / Panitia			
	- Ketua	1 OK	450.000	450.000
	- Sekretaris	1 OK	400.000	400.000
	- Anggota	5 OK	375.000	1.875.000
	Honorarium Tim Pemeriksa			
	- Ketua	1 OK	450.000	450.000
	- Sekretaris	1 OK	400.000	400.000
	- Anggota	5 OK	375.000	1.875.000
	JML BELANJA OPERASIONAL & PEM.			<i>Rp</i> 5.450.000

Kode Rekening	Uraian	Unit / Satuan	Harga Satuan	Jml Harga
2 16 01 2 2 .	2 BELANJA BARANG DAN JASA			
2 16 01 2 2 02 .	2 Biaya jasa pihak ketiga			
2 16 01 2 2 02 05	2 Biaya jasa Konsultan			
	- Perencanaan Teknik	1 pkt	Ls	78.901.000
	- Pengawasan Teknik	1 pkt	Ls	42.306.500
2 16 01 2 2 02 09	2 Biaya Dokumentasi			
	- Roll film Asa 400 x 36	2 roll	35.000	70.000,00
	- Battery Kecil	2 set	5.000	10.000,00
	- Cuci cetak film	2 roll	100.000	200.000,00
	- Album photo	2 Bh	25.000	50.000,00
2 16 01 2 2 03 .	2 Biaya cetak dan penggandaan			
2 16 01 2 2 03 02	2 Biaya Foto copy	7 5/8 lbr	200,00	1.515.000
2 16 01 2 2 03 03	2 Biaya Penjilidan	20 Buku	5.000	100.000
2 16 01 2 2 05 .	2 Biaya makanan dan minuman			
2 16 01 2 2 05 01	2 Biaya Makanan dan minuman			
	- Makan (15 Org x Rp. 15.000)	10 Kali	225.000,00	2.250.000,00
	- Minum (15 Org x Rp. 5.000)	10 Kali	75.000,00	750.000,00
	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA			126.152.500
2 16 01 2 3 .	2 BELANJA PERJALANAN DINAS			
2 16 01 2 3 01 .	2 Biaya Perjalanan Dinas			
2 20 01 2 3 01 02	2 Perjalanan Dinas luar Daerah			
	- Perjalanan dinas ke Kupang dalam rangka Konsultasi			
	<i>Gol IV Eselon II b 1 orang selama 5 hari</i>			
	* Transportasi : Pesawat Lewoleba - Kupang	1 OT	290.000	290.000
	* Lumpsum : 1 x 5 hari	5 OH	400.000	2.000.000
	<i>Gol III Eselon III 1 orang</i>			
	* Transportasi : Pesawat Lewoleba - Kupang	1 OT	145.000	145.000
	Kepal laut Kupang - Lewoleba	1 OT	100.000	100.000
	* Lumpsum : 1 x 5 hari	5 OH	350.000	1.750.000
	JML BELANJA PERJALANAN DINAS			Rp 4.285.000
	BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN			Rp 135.887.500
2 16 01 3	2 BELANJA MODAL			
2 16 01 3 6	2 Belanja Modal Bangunan gedung			
2 16 01 3 6 02	2 Belanja Modal Bangunan gedung untuk tmp kerja			
2 16 01 3 6 02 01	2 Belanja Modal bangunan gedung untuk Terminal Timur.			
	- Bangunan utama 12 x 20 m	240 m ²	1.400.000	Rp 336.000.000
	- Pelataran parkir 30 x 50 m	2500 m ²	56.500	Rp 141.250.000
	- Pagar keliling	400 m	450.000	Rp 180.000.000
	- Kamar mandi / WC 4 x 6	24 m ²	900.000	Rp 21.600.000
	- Lain - lain	1 pkt	Ls	5.837.500

Kode Rekening	Uraian	Unit / Satuan	Harga Satuan	Jml Harga
101 3 6 02 02	2 Belanja Modal Bangunan gedung untuk Terminal Barat			
	- Bangunan utama 10 x 20 m	200 m ²	1.400.000	Rp 280.000.000
	- Pelataran parkir 45 x 45 m	2025 m ²	56.500	Rp 114.412.500
	- Pagar keliling	220 m	450.000	Rp 99.000.000
	- Kamar mandi / WC 4 x 6	24 m ²	900.000	Rp 21.600.000
	- Lain - lain	1 pkt	LS	Rp 9.637.500
	JUMLAH BELANJA MODAL			Rp 1.211.137.500
	TOTAL			Rp 1.347.025.000

SUMBER BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN		Lewoleba, 26 Mei 2003	
Saluran I	Rp 269.405.000	 Pengguna Anggaran Drs. A. I. WADU NIP : 620 045 481	
Saluran II	Rp 404.107.500		
Saluran III	Rp 404.107.500		
Saluran IV	Rp 269.405.000		
JALAN	Rp 1.347.025.000		

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF				
Nama	NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
Drs. M. G. Pua	010 057 277	Sekretaris Daerah	Ketua	
Drs. Abystus da Silva	620 014 214	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	
Drs. Petrus T. Atawoto	620 015 817	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua II	
Yohanes Leusvehed, EA.	620 014 709	Kecata DISPEHDA	Wakil Ketua III	

Untuk syahmya Foto kopi
 dan Dinas Perhubungan
 dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata
 Trans MUDA, SH.
 Pembina
 Nip. 010 231531



DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA	D 3 B1.1
--------------------------------------	-----------------

DAFTAR ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN	: 2003
BIDANG PEMERINTAHAN	: PERHUBUNGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERHUBUNGAN & PARIWISATA
PROGRAM	: PEMBANGUNAN FASILITAS BANDAR UDARA
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR KELILING BANDARA MUNOPITO LEWOLEBA
SIFAT KEGIATAN	: BARU
LOKASI KEGIATAN	: LEWOLEBA - KABUPATEN LEMBATA
SUMBER DANA	: DAU
KONDISI SEBELUM KEGIATAN DILAKSANAKAN	: Kurang terjaminnya keamanan dan keselamatan penerbangan
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	: 120 (Seratus Dua Puluh) hari Kalender
PENGENDALI PELAKSANA KEGIATAN	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Biaya Pembangunan Pagar Keliling Bandara Udara	Rp 205.000.000
Keluaran	Pagar Keliling Bandar Udara Munopito	
Hasil	Tersedianya Sarana Pengaman Bandar Udara	
Manfaat	Terciptanya kondisi lingkungan yang menjamin keselamatan penumpang dan penerbangan	
Dampak	Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan pengunjung jasa angkutan udara.	

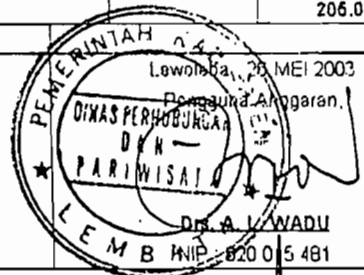
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Vol/stn	Harga/stn	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
2 16 01	2 PELAYANAN PUBLIK			
2 16 01 2	2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
2 16 01 2 1	2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA			
2 16 01 2 1 01	2 Honorarium/Upah			
	Ketua Panitia	1 OK	350.000	350.000,00
	Sekretaris Panitia	1 OK	325.000	325.000,00
	Anggota	5 OK	300.000	1.500.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa			
	- Ketua	1 OK	350.000	350.000,00
	- Sekretaris	1 OK	325.000	325.000,00
	- Anggota	5 OK	300.000	1.500.000,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA			4.350.000,00

Kode Rekening	Vol/stn	Harga/stn	Jumlah Harga
2 16 01 2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA		
2 16 01 2 2 02 2	Biaya Jasa Pihak Ketiga		
2 16 01 2 2 02 01 2	Biaya jasa Tenaga Kerja Non Pegawai		
	1 Paket	12.455.000,00	12.455.000,00
	1 Paket	7.140.000,00	7.140.000,00
2 16 01 2 2 02 03 2	Biaya Dokumentasi		
	1 roll	35.000,00	35.000,00
	1 set	5.000,00	5.000,00
	1 roll	100.000,00	100.000,00
	1 br	25.000,00	25.000,00
2 16 01 2 2 03 2	Biaya Cetak dan Penggandaan		
2 16 01 2 2 03 02 2	5.000 Lbr	200,00	1.000.000,00
2 16 01 2 2 03 03 2	20 Buku	5.000,00	100.000,00
2 16 01 2 2 06 2	Biaya Makanan dan minuman		
2 16 01 2 2 06 01 2	Biaya Makanan dan minuman		
	10 Kali	225.000,00	2.250.000,00
	10 Kali	75.000,00	750.000,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA			23.900.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			28.260.000,00
2 16 01 3 2	BELANJA MODAL		
2 16 01 3 6 2	Belanja Modal Bangunan Gedung		
2 16 01 3 6 01 04 2	1 Paket	176.750.000,00	176.750.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL			176.750.000,00
TOTAL			206.000.000,00

RENCANA BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	41.000.000
Triwulan II	Rp	61.500.000
Triwulan III	Rp	61.500.000
Triwulan IV	Rp	41.000.000
TOTAL	Rp	205.000.000



TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

No.	Nama	NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Drs. M. G. Pua	010 057 277	Sekretaris Daerah	Ketua	<i>[Signature]</i>
2.	Drs. Aloysius da Silva	620 014 214	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	<i>[Signature]</i>
3.	Drs. Petrus T. Atawolo	620 015 017	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua II	<i>[Signature]</i>
4.	Viktor Leuwahag, BA	620 014 214	Kepala DISPENDA	Wakil Ketua III	<i>[Signature]</i>

Untuk Sahaya Fotokopi
An. Kepala Dinas Perhubungan
dan Pariwisata Kabupaten Lembata
Repl. Bagian Tata Usaha



[Signature]
Frans Moga, S.H.
Pembina
Nip. 010 231 531

DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

DAFTAR ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

D3 B1.1

SATUAN KERJA

Tahun Anggaran : 2003
 Bidang Pemerintahan : Bidang Perhubungan
 Tingkat Daerah : Dinas Perhubungan dan Pariwisata
 Program : Pengembangan Pariwisata
 Kegiatan : Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lembata.
 Sub Kegiatan : Duru
 Lokasi Kegiatan : Seluruh Obyek / Kawasan Wisata Kabupaten Lembata - tersebar.
 Sumber Dana : DAU
 Status sebelum kegiatan dilaksanakan : Belum adanya rencana teknik terinci pada setiap kawasan pariwisata sehingga menyulitkan upaya pembangunan dan pengembangan secara terarah dan terencana.
 Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender
 Maksud pelaksanaan Kegiatan :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Manfaat :
 Dampak :

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Output	Biaya penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lembata.	Rp 281.331.200
Output	Buku RTRK Pariwisata Kabupaten Lembata	
Output	Tersusunnya RTRK sebagai acuan perencanaan pembangunan Pariwisata Lembata	95%
Output	1. Pembangunan Pariwisata dapat dilaksanakan secara terencana dan terarah. 2. Adanya acuan yang jelas dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan.	95%
Dampak	1. Semua aset wisata dapat dikemas dalam bentuk produk - produk wisata yang dapat dijual melalui perencanaan yang matang dan komprehensif 2. Terwujudnya suatu kondisi kepariwisataan yang berdaya saing Perekonomian rakyat melalui perencanaan dan manajemen yang profesional dan baik.	s/d 10 tahun

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG / KEGIATAN


Kode Rekening	URAIAN	Unit / Satuan	Harga satuan	Jml Harga
16 01	2 PELAYANAN PUBLIK			
16 01 2	2 BELANJA OPERASIONAL DAN PEM.			
16 01 2 1	2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			
16 01 2 1 01	2 Honorarium / Upah			
16 01 2 1 01 01	2 Honorarium Tim / Panitia			
	- Ketua	1 Org	500.000	500.000
	- Sekretaris	1 Org	450.000	450.000
	- Anggota	5 Org	350.000	1.750.000
	JML BELANJA OPERASIONAL PEG./PERSONALIA			Rp 2.700.000
2 16 01 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA			
2 16 01 2 2 02	2 Biaya jasa pihak ketiga			251.590.000
2 16 01 2 2 02 03	2 Biaya Dokumentasi			850.000
	- Film 5 rol 36 kall	5 bh	35.000	175.000
	- Bateray	5 psg	10.000	50.000
	- Cuci Celak	5 rol	100.000	500.000
	- Album	5 bh	25.000	125.000
2 16 01 2 2 02 04	2 Biaya Dekorasi	1 Pkt	Ls	740.000
2 16 01 2 2 02 05	2 Biaya Jasa Konsultan	1 pkt	LS	250.000.000
2 16 01 2 2 03	2 Biaya cetak dan penggandaan			3.196.200
2 16 01 2 2 03 01	2 - Biaya cetak dan Penggandaan blanko surat Ijin Usaha Pariwisata.	100 lbr	10.000	1.000.000
2 16 01 2 2 03 02	2 - Biaya Foto copy	10981 lbr	200	2.196.200
2 16 01 2 2 04	2 Biaya Sewa			5.900.000
2 16 01 2 2 04 01	2 Biaya sewa tempat	1 Paket	Ls	550.000
2 16 01 2 2 04 02	2 Biaya sewa kendaraan roda empat untuk kegiatan pendampingan Pokdarwis.	8 kall	500.000	Rp 4.000.000
2 16 01 2 2 04 04	2 Sewa peralatan	1 Paket	Ls	1.350.000
2 16 01 2 2 05	2 Biaya makanan dan minuman			Rp 2.500.000
2 16 01 2 2 05 02	2 Biaya makanan dan minuman 50 org x 5 kall	250 OK	10.000	2.500.000
	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA			Rp 253.186.200
2 16 01 2 3	2 BELANJA PERJALANAN DINAS			
2 16 01 2 3 01	2 Biaya Perjalanan Dinas			
2 16 01 2 3 01 01	2 Perjalanan Dinas dalam Daerah			Rp 4.330.000
	Pendampingan Kelompok Sadar Wisata			
	- Eselon II 1 org x 2 hr x 2 kall			
	Lumpsum	4 OH	80.000	Rp 320.000
	- Eselon III 1 org x 2 hr x 3 kall			
	Lumpsum	6 OH	60.000	Rp 360.000
	- Eselon IV 1 org x 2 hr x 5 kall			
	Lumpsum	10 OH	50.000	Rp 500.000
	- Non Eselon 5 org x 2 hr x 7 kall			
	Lumpsum	70 OH	45.000	Rp 3.150.000
2 16 01 2 3 01 02	2 Perjalanan Dinas luar Daerah			Rp 11.115.000
	Konsultasi, Rapat Dinas,			
	- Eselon II 1 org x 7 hr x 1 kall			
	Transportasi : Lewoleba - Lantuka PP	2 OT	10.000	Rp 20.000
	Lantuka - Maumara PP (Taxi)	2 OT	300.000	Rp 600.000
	Pesawat Maumera Denpasar PP	2 OT	850.000	Rp 1.700.000
	Lumpsum	7 OH	525.000	Rp 3.675.000

Kode Rekening	URAIAN	Unit / Satuan	Harga satuan	Jml Harga
	- Eselon IV 1 org x 7 hr x 1 kali			
	Transportasi : Lewoleba - Larantuka PP	2 OT	10.000 Rp	20.000
	Larantuka - Maumere PP (Taxi)	2 OT	300.000 Rp	600.000
	Pesawat Maumere Denpasar PP	2 OT	850.000 Rp	1.700.000
	Lumpsum	7 OH	400.000 Rp	2.800.000
	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah			
JML BELANJA PERJALANAN DINAS				Rp 15.445.000
TOTAL BIAYA				Rp 281.331.200

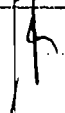
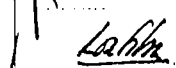


BIAYA BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

KETERANGAN

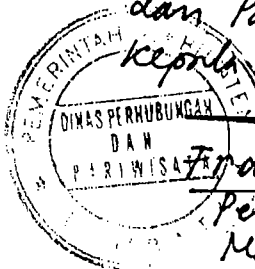
Kategori I	Rp 58.268.240
Kategori II	Rp 84.399.360
Kategori III	Rp 84.399.360
Kategori IV	Rp 58.268.240
Jumlah	Rp 281.331.200

Lewoleba, 26 Mei 2003
Pangguna Anggaran.

DRS. A. L. WADU
 NIP. 620 015 481

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

Nama	NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
Drs. M. G. Pue	010 057 277	Sekretaris Daerah	Ketua	
Drs. Aloysius da Silva	620 014 214	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	
Drs. Petrus T. Aterwolo	620 015 817	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua II	
Viktor Lauweheq, BA	620 014 706	Kepala DISPENLIA	Wakil Ketua III	

Untuk syahnya Foto Kopi
 dan Kepala Dinas Perhubungan
 dan Pariwisata Kabupaten Lembata
 Bagian Tata Usaha



Francis Muga, SH.
 Pembina
 Nip. 010 231531

DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

DAFTAR ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

SATUAN KERJA

D3 B1.1

Tahun Anggaran	: 2003
Bidang Pemerintahan	: Bidang Perhubungan
tingkat Daerah	: Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Program	: Pengembangan Pariwisata
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Wajirang (Pariwisata)
Status Kegiatan	: Lanjutan
Lokasi Kegiatan	: Wajirang - Nubatukan
Sumber Dana	: DAU
Kondisi sebelum Kegiatan dilaksanakan	: Kondisi obyektif sarana dan prasarana yang dibangun sebelumnya belum memadai untuk dijadikan aset rekreasi dan kerja sama kemitraan dengan pihak pengusaha pariwisata.
Waktu Pelaksanaan kegiatan	: 120 (Seratus dua puluh) hari kalender
Pengendalian pelaks. Kegiatan	:
Nama	:
Jabatan	:

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Biaya Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Wajirang.	Rp 127.189.450
Keuaran	- Pengembangan Obyek Wisata Wajirang - Pengelolaan Obyek Wisata Wajirang melalui suatu sistem manajemen yang baik.	
Hasil	- Obyek wisata Wajirang dapat dimanfaatkan secara optimal. - Sebagai suatu paket wisata yang dapat dijual kepada wisatawan.	Setelah serah terima dan pengresmitan proyek. 1 s/d 3 tahun.
Manfaat	- Merupakan suatu sumber pendapatan daerah. - Peningkatan pendapatan masyarakat. - Terciptanya lapangan kerja	3 s/d 5 tahun
Dampak	Tergeraknya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan Obyek Wisata yang dibangun.	5 s/d 10 tahun

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG / KEGIATAN

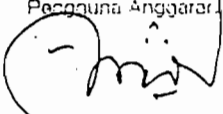
Kode Rekening	URAIAN	Unit / Satuan	Harga satuan	Jml Harga
2 16 01	PELAYANAN PUBLIK			
2 16 01 2	BELANJA OPERASIONAL DAN PEM.			
2 16 01 2 1	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			
2 16 01 2 1 01	Honorarium / Upah			
2 16 01 2 1 01 01	Honorarium Timi / Panitia			
	- Ketua	1 Org	300.000	300.000
	- Sekretaris	1 Org	275.000	275.000
	- Anggota	5 Org	250.000	1.250.000
	Honorarium Timi Pereriksa			
	- Ketua	1 Org	300.000	300.000
	- Sekretaris	1 Org	275.000	275.000
	- Anggota	5 Org	250.000	1.250.000
2 16 01 2 1 01 04	Upah kerja Pengelola obyek wisata Wajirang 1 Orang 12 bulan	12 OB	350.000	4.200.000
	JML BELANJA OPERASIONAL PEG./PERSONALIA			Rp 7.850.000
2 16 01 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA			
2 16 01 2 2 02 03	Biaya Dokumentasi			170.000
	Film 1 rol 36 kali	1 bh	35.000	35.000
	Batterey	1 psg	10.000	10.000
	Cuci Cetak	1 rol	100.000	100.000
	Album	1 bh	25.000	25.000

Kode Rekening	URAIAN	Jml / Satuan	Harga satuan	Total Harga
16 01 2 2 02 .	2 Biaya jasa pihak ketiga			9.914.450
16 01 2 2 02 06	2 Biaya perencanaan dan pengawasan teknis.	1 pkt	US	9.914.450
16 01 2 2 03 .	2 Biaya cetak dan penggandaan			2.370.000
16 01 2 2 03 01	2 - Biaya pengadaan SK Perijinan dan Lampiran	100 eks	7.200	720.000
	- Penggadaan Formulir Perijinan	100 pkt	10.000	1.000.000
	- Pencetakan Karcis Masuk Obyek Wisata	130 blk	5.000	650.000
16 01 2 2 03 02	2 - Biaya Foto copy	9375 lbr	200	1.935.000
16 01 2 2 04	2 Biaya Sewa			
16 01 2 2 04 01	2 Biaya Sewa Kendaraan untuk kegiatan pendampingan Pokdarwis.	4 kali	550.000	Rp 2.200.000
				2.200.000
16 01 2 2 05	2 Biaya Makanan dan Minuman			
16 01 2 2 05 02	2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat Panitia (20 org x 10 kali)	200 OKy	10.000	Rp 2.000.000
				Rp 2.000.000
JUMLAH BELANJA BARANG & JASA				Rp 18.589.450
BELANJA PERJALANAN DINAS				
16 01 2 3 .	2 Biaya perjalanan Dinas			
16 01 2 3 01 01	2 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah			Rp 6.620.000
	Pendampingan Kelompok Sadar Wisata dan Monitoring kegiatan Pokdarwis			
	- Eselon II 1 org x 2 hr x 2 kali			
	Lumpsum	4 OH	80.000	Rp 320.000
	- Eselon III 1 org x 2 hr x 2 kali			
	Lumpsum	5 OH	60.000	Rp 300.000
	- Eselon IV 1 org x 2 hr x 5 kali			
	Lumpsum	10 OH	50.000	Rp 500.000
	- Non Eselon 5 org x 2 hr x 10 kali			
	Lumpsum	100 OH	45.000	Rp 4.500.000
16 01 2 3 01 02	2 Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah			21.555.000
	Konsultasi, rapat dinas.			
	Eselon II : 1 org x 7 x hari x 1 kali			
	- Eselon II 1 org x 7 hr x 1 kali			
	Transportasi : Lewoleba - Larantuka PP	2 OT	10.000	Rp 20.000
	Larantuka - Maumere PP (Taxi)	2 OT	300.000	Rp 600.000
	Pesawat Maumere Denpasar PP	2 OT	850.000	Rp 1.700.000
	Lumpsum	7 OH	525.000	Rp 3.675.000
	- Eselon III 1 org x 7 hr x 1 kali			
	Transportasi : Lewoleba - Larantuka PP	2 OT	10.000	Rp 20.000
	Larantuka - Maumere PP (Taxi)	2 OT	300.000	Rp 600.000
	Pesawat Maumere Denpasar PP	2 OT	850.000	Rp 1.700.000
	Lumpsum	6 OH	500.000	Rp 3.000.000
	Eselon IV : 1 org x 7 hari x 2 kali			
	Transportasi : Lewoleba - Larantuka PP	4 OT	10.000	Rp 40.000
	Larantuka - Maumere PP (Taxi)	4 OT	300.000	Rp 1.200.000
	Pesawat Maumere Denpasar PP	4 OT	850.000	Rp 3.400.000
	Lumpsum :	14 OH	400.000	Rp 5.600.000
JUMLAH BELANJA PERJALANAN DINAS				Rp 27.175.000
BELANJA MODAL				
2 16 01 3 .	2 Belanja modal instalasi			
2 16 01 3 4 .	2 Belanja modal instalasi air minum/bersih			Rp 21.000.000
2 16 01 3 4 01	2 Belanja modal instalasi air minum/bersih di obyek			
2 16 01 3 4 01 01	2 Wisata Waljarang	1 pkt	US	16.500.000
2 16 01 3 4 01 02	2 Belanja rangka tower 4 m tinggi	1 unit	2.200.000	2.200.000
2 16 01 3 4 01 03	2 Belanja tong air fiber 3000 liter	1 unit	2.300.000	2.300.000

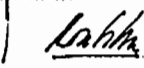

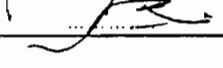
Kode Rekening	URAIAN	Unit / Satuan	Harga satuan	Jml Harga
2 16 01 3 5	2 Belanja modal jaringan			39.175.000
2 16 01 3 5 02	2 Belanja modal jaringan Listrik			
2 16 01 3 5 02 01	2 Belanja modal jaringan Listrik di Obyek Wisata Wajirang			
	- Jaringan listrik	1 pkt	LS	18.500.000
	- Belanja modal mesin listrik 5 KVA	1 unit	LS	20.675.000
	- Belanja modal mesin pompa air	1 unit	LS	2.000.000
2 16 01 3 6	2 Belanja modal bangunan gedung			Rp 5.225.000
2 16 01 3 6 01 02	2 Belanja modal rumah mesin listrik 4 x 2 m di Obyek Wisata Wajirang	1 unit	5.225.000	5.225.000
2 16 01 3 12 04	2 Belanja modal meja dan kursi			Rp 2.250.000
2 16 01 3 12 04 01	2 Belanja modal meja dan kursi di obyek wisata Wajirang			
	- Meja Biro	1 bh	750.000	750.000
	- Meja 1/2 biro	2 bh	500.000	1.000.000
	- Kursi Kayu	5 bh	100.000	500.000
2 16 01 3 13	2 Belanja Modal Alat Studio & Alat Komunikasi			Rp 6.925.000
2 16 01 3 13 01	2 Belanja Modal Alat Studio			
2 16 01 3 13 01 01	2 Belanja Modal Alat Studio			
	- Televisi 20 Inci	1 bh	2.500.000	2.500.000
	- Salon / Speaker	1 set	1.000.000	1.000.000
	- VCD Player	1 bh	750.000	750.000
	- Mic	3 bh	100.000	300.000
	- Amplifier	1 bh	750.000	750.000
	- Kaset CD	1 set	625.000	625.000
JUMLAH BELANJA MODAL				73.575.000
TOTAL BIAYA				Rp 127.189.450

RENCANA BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN PER TRIWULAN


Triwulan I	Rp 25.437.090
Triwulan II	Rp 38.156.835
Triwulan III	Rp 38.156.835
Triwulan IV	Rp 25.437.690
TOTAL	Rp 127.189.450

Lewoleba, 26 Mei 2003
 Pengguna Anggaran

DRS. A. L. WADU
 NIP 620 015 481

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

No.	Nama	NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Drs. M. G. Pua	010 057 277	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Drs. Aloysius da Silva	620 014 214	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	
3.	Drs. Petrus T. Atawolo	620 015 817	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua II	
4.	Viktor Leuweheq, BA	620 014 706	Kepala DISPENSA	Wakil Ketua III	

Untuk syahnya foto kopi
 dan Kepala Dinas Perhubungan
 dan Sekretaris Dinas Kabupaten Lembata
 Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata
 Frans Muga, SH.
 Pembina
 Nip 010 231 531



DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

D 3 B1.1

**DAFTAR ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
SATUAN KERJA**

TAHUN ANGGARAN	: 2003
BIDANG PEMERINTAHAN	: PERHUBUNGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERHUBUNGAN & PARIWISATA
PROGRAM	: PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMB/PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN	: PENGADAAN SUMBER DAYA SARANA PENUNJANG DINAS PERHUBUNGAN DA PARIWISATA
SIFAT KEGIATAN	: BARU
LOKASI KEGIATAN	: LEWOLEBA - KABUPATEN LEMBATA
SUMBER DANA	: DAU
KONDISI SEBELUM KEGIATAN DILAKSANAKAN	Kiirangnya fasilitas kantor dan fasilitas mobilitas aparatur dalam membenarkan pelayanan sesuai dgn tugas dan fungsinya
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	: 120 (Seratus Dua Puluh) hari Kalender
PENGENDALI PELAKSANA KEGIATAN	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Biaya Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang	Rp 33.365.000
Keluaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	
Hasil	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kantor = Kendaraan Roda Dua = Computer = Printer	Bertambah
Manfaat	Proses kerja	Semakin lancar
Dampak	Aktifitas dan Efisiensi Pelayanan	Meningkat

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Vol/stn	Harga/stn	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
2 16 01	1 APARATUR			
2 16 01 2	1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
2 16 01 2 1	1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA			
2 16 01 2 1 01	1 Honorarium/Upah			
	Ketua Panitia	1	OK 200.000	200.000,00
	Sekretaris Panitia	1	OK 150.000	150.000,00
	Anggota	5	OK 125.000	625.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa			
	Ketua Panitia	1	OK 200.000	200.000,00
	Sekretaris Panitia	1	OK 150.000	150.000,00
	Anggota	5	OK 125.000	625.000,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA			1.950.000,00

Kode Rekening	Uralan	Vol/stn	Harga/stn	Jumlah Harga
2 16 01 3	1 BELANJA MODAL			
2 16 01 3 9	1 Belanja Modal Alat - alat Angkutan			
2 16 01 3 9 01	1 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor			
2 16 01 3 9 01 01	1 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua (GL MAX)	1 Unit	18.300.000	18.300.000,00
2 16 01 3 12	1 Belanja Modal Computer			
2 16 01 3 12 03 01	1 Belanja Modal Computer LG	1 Unit	10.000.000	10.000.000,00
2 16 01 3 12 03 02	1 Belanja Modal Printer	1 Unit	3.115.000	3.115.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL				31.416.000,00
TOTAL				33.366.000,00

RENCANA BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

PER TRIMULAN

Trimulan I	Rp	8.873.000
Trimulan II	Rp	10.000.500
Trimulan III	Rp	10.000.500
Trimulan IV	Rp	8.873.000
TOTAL	Rp	33.366.000

Lembata, 26 Mei 2003

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LEMBATA
DIVISI PERHUBUNGAN
UPTD
PARIWISATA

Dr. A. L. WADU
NIP. 820 015 481

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

No.	Nama	NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Drs. M. G. Pua	010 057 277	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Drs. Aloysius da Silva	620 014 214	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	<i>Lalita</i>
3.	Drs. Petrus T. Atawolo	620 015 617	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua II	<i>Pato</i>
4.	Viktor Leuweheq, BA	620 021 217	Kepala DISPENDA	Wakil Ketua III	<i>J...</i>

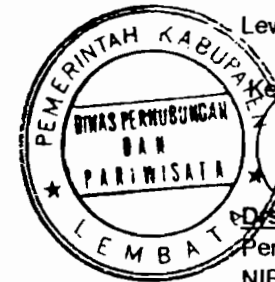
*Untuk sahnya fotokopi
dari Kepala Dinas Perhubungan
dan Pariwisata Kabupaten Lembata
Kepala Bagian Tata Usaha
Frans Mungu, SH.
Pembiaya
Nip. 010231531*

**PERHITUNGAN PROGRES FISIK
DAN REALISASI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2003
TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	PROGRAM	URAIAN JENIS KEGIATAN JENIS PENGELUARAN	REALISASI			SISA			KET
			Fisik	KEUANGAN	Jumlah	Fisik	KEUANGAN	Jumlah	
			%	%	Rp.	%	%	Rp.	
1		2				6		7	9
1	<i>Program :</i> Pembangunan Sarana dan Prasara - na Penunjang Perhubungan Darat.	<i>Kegiatan :</i> - Pembangunan Terminal Timur - Pembangunan Terminal Barat - Perencanaan Terminal Timur dan Barat - Pengawasan Terminal Timur dan Barat	89.57%	30%	205,875,000.00	10.43%	70.00%	480,375,000.00	
			94.87%	30%	156,750,000.00	5.13%	70.00%	365,750,000.00	
			100.00%	80%	60,985,000.00	0.00%	20.00%	17,815,000.00	
			89.57%	0%	-	10.43%	100.00%	42,000,000.00	
2	<i>Program :</i> Pembangunan Fasilitas Bandar Udara.	<i>Kegiatan :</i> - Pembangunan Pagar Keliling Bandar Udara. - Perencanaan Pagar Keliling Bandar Udara. - Pengawasan Pagar Keliling Bandar Udara.	100.00%	100.00%	175,000,000.00	0%	0%	-	
			100.00%	100.00%	9,920,000.00	0%	20%	2,480,000.00	
			100.00%	0%	-	100%	100%	7,140,000.00	

NO	PROGRAM	URAIAN JENIS KEGIATAN JENIS PENGELUARAN	REALISASI			SISA			KET
			Fisik	KEUANGAN	Jumlah	Fisik	KEUANGAN	Jumlah	
			%	%	Rp.	%	%	Rp.	
1		2				6		7	9
3	Pengembangan Pariwisata daerah	<i>Kegiatan :</i> - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Pariwisata Kab. Lembata - Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang. - Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waijarang.	100.00%	65%	162,435,000.00	0%	35%	87,465,000.00	
			98.35%	67.49 %	49,584,228.00	1.65%	32.51%	23,884,772.00	
			98.35%	-	-	98.35	100%	9,800,000.00	
4	Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	<i>Kegiatan :</i> Pengadaan Sumber Daya Sarana Penunjang Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Lembata	100.00%	100.00%	31,300,000.00	0%	0%	-	
		JUMLAH						1,036,709,772	

Lewoleba, 31 Desember 2003



Kepala Dinas
[Signature]
 D.S. A. L. WADU
 Pembina
 NIP. 620 015 481

